

Review Buku

KEKERASAN ALA KAPITALISME

Sebuah Telaah atas Buku *Violence and Democratic Society*

Athiqah Nur Alami (Kandidiat Peneliti P2P-LIPI)

Judul Buku : *Violence and Democratic Society*
Penulis : Prof. DR. Jamil Salmi, Ph.D.
Penerjemah : Slamet Raharjo
Penerbit : Kelompok Pilar Media, Februari 2005
Halaman : 292 halaman

Abstract

The rise of capitalism at the present does not mark it as a glorious ideology. Capitalism has many dark sides that we should aware. One of the dark sides that is worth to be noticed is the emergence of violence against human that happened to maintain the existence of Capitalism itself. The Violence has various forms, direct violence and indirect violence. Each form of the violence brings consequence that is often disrespect the universal human rights.

Istilah kekerasan dan kapitalisme berasal dari dua akar ilmu sosial yang berbeda. Kekerasan merupakan istilah dalam sosiologi, sedangkan kapitalisme muncul dalam ilmu ekonomi. Namun demikian, kedua istilah tersebut memiliki keterkaitan karena ternyata paham kapitalisme yang kemudian berkembang tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga politik, mempengaruhi berbagai sendi kehidupan masyarakat dunia saat ini, termasuk menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan, baik langsung maupun tidak langsung.

Teori-teori tentang kapitalisme yang berkembang pada abad ke-18, 19, dan 20 berada dalam konteks revolusi industri dan imperialisme Eropa serta perang dingin. Para teoritis tersebut menggambarkan kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi yang

bercirikan modal dimiliki oleh individu swasta dan keputusan ekonomi ditentukan oleh pasar¹.

Konstelasi perpolitikan dunia pasca-perang dingin mengalami perubahan yang cukup signifikan. Runtuhnya komunisme di Uni Soviet dan pertumbuhan ekonomi pasar sosialis di Cina serta globalisasi, semakin memperkuat paham kapitalisme dunia. Tesis Francis Fukuyama yang mentakdirkan kapitalisme sebagai “pemenang tunggal” semakin membuat yakin dunia bahwa tidak ada ideologi lain yang bisa bertahan selain kapitalisme. Kemenangan liberalisme ekonomi dan politik serta demokrasi liberal Barat yang gemilang membuktikan bahwa

¹ Capitalism-Wikipedia, *the free encyclopedia* yang diakses pada 3 Juli 2006.

liberalisme merupakan satu-satunya ideologi pemerintah yang paling tepat.

Namun di balik kejayaannya, kapitalisme ternyata menyimpan wajah gelap yang perlu kita kritisi bersama. Jurang pemisah masih menganga di antara retorika kemenangan kapitalisme dan sisi gelap kehidupan sehari-hari umat manusia.

Di balik jargon-jargon kapitalisme, yaitu kemajuan (*progress*), pertumbuhan (*growth*) dan kemakmuran (*prosperity*), terdapat masalah-masalah dunia seperti kelaparan, kemiskinan, tuna wisma, buta huruf, rendahnya tingkat kesehatan, pengangguran, ketimpangan sosial, peredaran obat terlarang, dan segala bentuk kekerasan.

Violence and Democratic Society yang ditulis oleh Prof. Dr. Jamil Salmi, Ph.D. ini berusaha untuk menguak segala tabir gelap kapitalisme tersebut, dan membuka mata pikiran kita bahwa kapitalisme bukanlah sebuah ideologi pemenang seperti yang dilontarkan oleh Fukuyama. Buku ini mengkaji keterkaitan langsung antara berbagai aspek dalam tindak kekerasan yang terjadi akibat biasanya pandangan kapitalisme terhadap kekerasan tersebut. Kategorisasi bentuk kekerasan sebagai modus pelanggaran hak asasi manusia, perangkaian secara struktural dan etis mengenai peran dan “kebermaknaan” kekerasan merupakan dampak akumulasi modal dalam sistem kapitalisme.

Istilah kekerasan dalam ranah kapitalisme yang terdapat dalam buku ini bermakna kekerasan bukanlah kecelakaan atau kesalahan, tapi justru diperlukan demi keberlangsungan kapitalisme. Kekerasan dilihat bukan dari kacamata pemerintah, tapi dari kacamata korban kekerasan. Definisi korban kekerasan, baik perorangan maupun kelompok ada baiknya mengacu pada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, terutama pada paragraf 1 dan 2 yaitu: “Korban berarti orang yang secara

perorangan dan kelompok menderita kerugian, termasuk cedera fisik dan mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan nyata terhadap hak dasar mereka”².

Kritik atas Pendekatan dalam Memandang Kapitalisme

Profesor asal Maroko dari *Institute of Educational Panning* di Rabat ini mengawali uraiannya dengan membeberkan lima jenis karakteristik pendekatan persepsi dan perhatian masyarakat demokratis-kapitalis yang bias, tidak benar, saling berkaitan dan saling melengkapi dalam memandang kekerasan.

Pertama, ia mengungkapkan adanya analisis yang dangkal atau *superficial* atas makna kekerasan. Media massa hanya memberitakan aspek-aspek kekerasan yang paling mudah dilihat secara visual, sedangkan bentuk-bentuk kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia yang menurut mereka tidak layak diberitakan tidak akan dimuat, meskipun kekerasan itu sangat dramatis. Perhatian publik hanya terfokus pada kekerasan yang instan dan sensasional yang digembar-gemborkan media massa, seperti perampokan bank, pembajakan pesawat. Namun demikian, tidak menaruh perhatian pada seorang kondisi imigran dari suku Indian Barat di London atau Puerto Rico di New York atau Arab di Paris yang menjadi korban kekerasan.

Kedua, adanya analisis yang kurang proporsional oleh masyarakat Barat. Mereka melebih-lebihkan wilayah dan intensitas kekerasan yang sebenarnya tidak begitu serius atau mereka mereduksi suatu tindak kekerasan sehingga dampaknya menjadi minimal. Ketika orang membandingkan jumlah korban teroris, sikapnya terhadap pelaku terorisme di Eropa seperti IRA, *Action Directe*, Brigade Merah atau *Al-Qaeda*,

² Theo van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban*, ELSAM, Jakarta, 2002, hlm. 6.

tidaklah sama sikap mereka terhadap serangan yang dilakukan pemerintah Israel terhadap bangsa Palestina, Lebanon, Tunisia, dan Irak.

Setelah membandingkan sikap masyarakat Barat terhadap kasus kekerasan, terlihat adanya ketidakproporsionalan sikap Barat terhadap kekerasan. Tidak proporsional ini terjadi karena konsep tentang perlindungan hak asasi manusia yang dimaknai sempit. Ketika parlemen Prancis membahas kemungkinan penghapusan perbudakan selama abad ke-19, topik utamanya yaitu berapa banyak kompensasi yang harus diterima pemilik budak jika perbudakan dihapuskan, bukan pada kompensasi yang harus diterima oleh para budak yang sekian tahun menderita dan dibelenggu kebebasannya.

Ketiga, adanya analisis individualistik yang keterlaluan. Maksudnya yaitu hanya memperhitungkan faktor-faktor individu yang pada kenyataannya dianggap sebagai pendekatan yang objektif. Hubungan kausal antara kekerasan yang diamati dan struktur sosial yang melingkupinya dilenyapkan secara sistematis. Konsekuensinya analisis tersebut gagal menelusuri hubungan-hubungan logis antara seorang individu sebagai pelaku atau korban dan kelompok atau kelas sosial darimana dia berasal.

Di masa lampau, ketika Afrika dijajah Prancis, Inggris, Spanyol, dan Portugal, kaum nasionalis yang berjuang melawan penjajah digambarkan dan dituduh sebagai gangster, agitator, ekstremis, pemimpin gerombolan atau pembunuh, bukannya sebagai pejuang kebebasan. Kini, ketika kelompok oposan menentang rezim-rezim brutal di El Salvador, Guatemala atau Afrika Selatan yang terpaksa menggunakan kekerasan, mereka tidak pernah dianggap sebagai patriot yang menentang tatanan sosial yang represif dan tidak adil, namun sebagai teroris fanatik yang hanya bertujuan menciptakan anarki dan keprakeropandaan.

Menurut Salmi, kelemahan dari analisis individualistik ini adalah kenyataan analitis yang mengesampingkan sepenuhnya bentuk-bentuk kekerasan institusional, terutama yang dilakukan oleh negara itu sendiri. Individu yang melaksanakan kekerasan dipersalahkan, tapi tidak ada seorang pun yang mendakwa pihak lain di balik layar atau dalang dari *state terrorism* ini. Terlihat misalnya ketika sejarah memutuskan hanya ada satu tertuduh dalam pembunuhan massal My Lai yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat secara biadab terhadap 450 orang penduduk desa di Vietnam Selatan, yaitu Letnan William Calley. Sementara kitapun tidak pernah menentang keterlibatan AS di Vietnam.

Tuduhan atas pelaku terorisme yang selama ini berkembang lebih banyak diarahkan pada *non-state actors* dan jarang mengungkap pelaku *state actor*. Padahal menurut Prof. Igor Primoratz dalam tulisannya berjudul "*State Terrorism and Counterterrorism*"³, *state terrorism* justru lebih berbahaya daripada *non-state terrorism*. Alasan **pertama**, dalam berbagai cara, *state terrorism* merupakan gabungan dari aksi yang penuh kerahasiaan, tipu daya, dan kemunafikan. Ketika terlibat dalam suatu aksi terorisme—apakah pelakunya negara itu sendiri atau negara proxinya—sebuah negara akan bertindak sembunyi-sembunyi. Suatu negara tidak mengakui segala bentuk keterlibatan dan mengaku taat pada nilai-nilai dan prinsip yang mengaturnya. Bahkan alasan yang digunakan ketika melakukan tindakan terorisme adalah sebagai legitimasi tindakan perang atau dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan negara. **Kedua**, Primoratz mengutip tulisan Walter Laquer dalam buku "*The Age of Terrorism*" yang menyatakan bahwa tindakan teror yang

³ Prof. Igor Primoratz, *State Terrorism and Counterterrorism*, Working Paper Number 2002/3, Centre for Apply Philosophy and Public Ethics, dalam <http://eprints.unimelb.edu.au/archive/00000137/01/Primorat.pdf>.

dilakukan oleh negara polisi dan pemerintahan tirani, bertanggung jawab atas ribuan kali lebih banyak korban dan kesengsaraan ketimbang tindakan terorisme individu yang dilakukan bersama-sama.

Kritikan **terakhir** Salmi atas pendekatan dalam memahami kekerasan bahwa kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sering ditampilkan hanya dengan analisis sepihak atau satu sisi pandangan ideologis. Ini terlihat dalam kekhawatiran pemerintah Amerika Serikat terhadap upaya pelaksanaan hak asasi manusia di negerinya Ayatollah Khomeini. Iran akan tampak lebih diakui dan absah jika sikap penghargaan atas pelaksanaan hak asasi manusia tersebut diberikan kepada Syah Iran, yang menyiksa lawan-lawan politiknya melalui tangan-tangan polisi rahasianya di saat Syah berkuasa. Kekerasan yang bias dan sengaja juga tampak dalam pilihan kata dan ungkapan yang digunakan oleh media massa. Perlakuan terhadap gerakan pemberontakan Palestina (Intifadha) selama akhir tahun 1980-an adalah contoh lain yang jelas-jelas diberitakan secara bias. Opini publik Amerika Serikat yang diarahkan lebih bersimpati kepada Israel terlihat sangat nyata dalam pemberitaan media. Ketika ratusan orang Palestina dibunuh oleh tentara Israel yang ditempatkan di Tepi Barat dan Jalur Gaza, pers Amerika Serikat hanya memberitakannya di halaman pojok. Sementara itu kematian seorang warga Israel menjadi *headline* dan diliput di halaman muka. Pemberitaan tentang kematian Tirzah Poret seorang korban “terorisme” Palestina yang tidak berdosa yang dimasukkan dalam tajuk rencana *Washington Post* tertanggal 8 April 1988, berlawanan dengan pemberitaan yang kering dan sangat tidak berimbang tentang meninggalnya 130 orang Palestina lanjut usia di Tepi Barat.

Bentuk-Bentuk Kekerasan

Bagian berikutnya dalam buku ini yang semakin menarik, yaitu setelah menelaah berbagai pendekatan masyarakat kapitalis dalam memandang kekerasan, Salmi berupaya mengkategorisasikan berbagai kekerasan tersebut ke dalam empat bentuk kekerasan. Di dalam merumuskan empat bentuk kekerasan tersebut dia mensyaratkan harus memenuhi dua kriteria yang didasarkan pada bentuk-bentuk kekerasan yang analitis, tidak parsial dan teliti, yaitu objektivitas (*objectivity*) dan kelengkapan yang mendalam (*exhaustivity*). Bentuk kekerasan tersebut adalah kekerasan langsung, kekerasan tidak langsung, kekerasan represif, dan kekerasan alienatif.

Bentuk kekerasan yang **pertama** yaitu kekerasan langsung. Kekerasan ini merujuk pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis orang secara langsung. Penggunaan kekerasan langsung ini, menurut Salmi, mempunyai tiga fungsi, yaitu sebagai cara untuk mengakses sumber daya alam, sebagai cara yang efektif untuk mencari tenaga kerja, dan sebagai cara untuk menjaga kelangsungan kapitalisme hingga sekarang ini. Sepanjang catatan sejarah suatu bentuk kegiatan ekonomi, kapitalisme tidak bisa berkembang di lingkungan yang sumber daya alamnya masih perawan dan tersedia secara bebas untuk semua orang. Kapitalisme membutuhkan persediaan sumber daya alam (tanah, air, minyak, dan bahan mineral) yang dimiliki oleh sektor privat (swasta) atau penguasaan sumber daya alam oleh swasta sebagai bentuk penolakan terhadap kepemilikan atau penguasaan sumber daya alam secara kelompok.

Sejarah Amerika Serikat sepanjang abad ke-18 diwarnai tindakan perampasan tanah-tanah bangsa asli orang kulit berwarna (suku Indian) oleh orang kulit putih. Sebelum

tahun 1860, penduduk Indian telah berkurang hampir dua pertiga. Mimpi suku Indian berakhir pada 18 Desember 1890, ketika pasukan Amerika Serikat membunuh 200 orang laki-laki, perempuan dan anak-anak di Wounded Knee.

Penggunaan kekerasan untuk mengontrol sumber daya alam bukan hanya terjadi di masa lampau. Di Amerika Serikat juga, suku Navajo Indian di bagian barat daya dan suku Sioux di Dakota terusik oleh perusahaan-perusahaan pertambangan besar yang sangat bernafsu mengeruk batu bara dan uranium yang ada di daerah kekuasaan suku Indian itu. Begitu juga yang terjadi pada suku Aborigin di Australia, Tasmania, Selandia Baru, dan Tahiti.

Fungsi untuk mencari tenaga kerja juga diyakini Salmi sebagai tujuan dari kekerasan langsung. Banyak pekerja di Haiti setiap tahunnya direkrut dengan jalan “ditangkap, dirazia, dan dipaksa”, kemudian dikirim ke Republik Dominica untuk dipekerjakan di perkebunan tebu. Fungsi ini memang banyak ditemukan di negara Dunia Ketiga. Bentuknya antara lain, pertama perbudakan hutang. Di banyak negara, ketika dalam keadaan sulit, misalnya gagal panen, maka untuk bertahan hidup para petani terpaksa meminjam uang dari rentenir. Jika panen berikutnya gagal lagi, mereka memasuki pintu perbudakan karena jeratan hutang. Fenomena ini banyak berkembang di India dan Bangladesh. Bentuk kedua dari kerja paksa berhubungan dengan penggunaan tahanan atau narapidana sebagai tenaga kerja yang “dikontrak” oleh perusahaan-perusahaan swasta. Di Kolombia, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menggunakan beribu-ribu tahanan sebagai tenaga kerja dengan gaji yang tidak masuk akal. Bentuk ketiga yaitu beberapa pemerintah mengambil tenaga kerja secara paksa dan menggunakannya untuk bekerja di sektor publik tanpa digaji. Praktik ini banyak terjadi di Indonesia, Liberia, dan Pakistan.

Fungsi kekerasan langsung yang terakhir terletak pada upaya melestarikan tatanan orde kapitalisme. Pada tingkat internasional, sebagian besar negara dengan sistem ekonomi kapitalis, rezim politiknya bersifat otoriter. Kecuali di negara-negara Barat yang demokratis dan beberapa negara Dunia Ketiga yang belakangan ini telah mengganti pemerintahan diktatornya, dapat diamati bahwa pembunuhan dengan kepentingan politik, pembunuhan massal masyarakat sipil, penahanan yang semauanya sendiri, penculikan dan “penghilangan orang” merupakan metode yang biasa digunakan di seluruh dunia untuk meredakan tuntutan kebebasan dan keadilan yang berlebih.

Salmi dapat menyimpulkan bahwa dimensi ekonomi turut berperan dalam sebagian besar perang dan konflik yang pecah mulai abad ke-15. Di antaranya terlihat dalam konflik Utara-Selatan. Bentuknya, antara lain perdagangan budak, perang melawan penjajah, perang untuk memperoleh kemerdekaan dan intervensi militer saat perang dingin. Jelas bahwa semua konflik itu tujuan pokoknya adalah untuk memenuhi tujuan-tujuan ekonomis, seperti upaya perluasan wilayah kekuasaan, upaya untuk mengendalikan sumber daya alam, pencarian pasar-pasar baru atau peluang investasi atau kebutuhan untuk mencari tenaga kerja murah. Dan penggunaan senjata dalam kekerasan langsung bukanlah sekadar cerita yang mengada-ada dalam sejarah kapitalisme. Bahkan hal ini merupakan cara yang wajar untuk menciptakan, melestarikan, atau mengubah hubungan-hubungan ekonomi dan sosial yang menjadi ciri sistem produksinya.

Bentuk kekerasan **kedua** yaitu kekerasan tidak langsung yang bermakna tindakan yang membahayakan manusia juga, tetapi tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak yang bertanggung jawab atas tindak kekerasan tersebut.

Salmi mengkategorikan kekerasan tidak langsung ke dalam dua jenis, yaitu

kekerasan yang dimediasi atau termediasi dan kekerasan dengan atau karena pembiaran.

Kekerasan yang dimediasi atau termediasi merupakan hasil intervensi manusia secara sengaja terhadap lingkungan alam atau sosial yang membawa pengaruh secara tidak langsung pada manusia lain. Pokok kajian dari bentuk kekerasan ini ada empat, yaitu pengaruh kolonialisme, pengaruh fisik proses produksi, pengaruh sifat hasil-hasil produksi, dan pengaruh kemajuan teknologi.

Selain tindakan militerisme, kolonialisme memiliki pengaruh pada kehidupan masyarakat terjajah yang memburuk. Misalnya berupa penyebaran epidemi penyakit yang berbahaya, rusaknya keseimbangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat dan wabah kelaparan akibat *supply* makanan yang minim.

Contoh lain dari kekerasan yang termediasi dapat ditemukan dalam berjalannya proses produksi. Di banyak industri, para pekerja setiap hari melakukan kontak dengan limbah produksi atau mesin yang mengancam keselamatan dan kesehatan mereka, karena mengakibatkan keracunan, alergi kulit, keguguran atau mutasi genetik, dan penyakit kronis. Proses produksi secara fisik tidak hanya berdampak pada pekerja, tapi juga membawa konsekuensi bagi lingkungan di luar perusahaan tersebut. Kerusakan ekologis ini dapat berupa kerusakan lingkungan alam dan penipisan sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Sifat-sifat hasil produksi menciptakan bentuk kekerasan yang termediasi yang lain dalam sistem ekonomi kapitalis. Karena tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya maka mereka menjual semua yang diproduksi. Ini berarti bahwa kemampuan menjual sebuah produk menjadi kriteria pokok dalam menentukan barang dan usaha produksi. Sehingga produk yang dijual kurang memperhitungkan dampak negatif atau positif produk tersebut bagi kesehatan

dan keselamatan konsumen. Di negara-negara industri, terdapat hubungan yang jelas antara produk yang dikonsumsi masyarakat dan penyakit yang mereka derita. Konsumsi daging dan lemak yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit jantung, hepatitis, dan sebagainya.

Bentuk kekerasan termediasi lainnya terlihat pada dampak kemajuan teknologi. Selama masa penjajahan, kehidupan masyarakat tradisional pedesaan di banyak negara secara brutal berubah dengan diperkenalkannya “pertanian untuk perdagangan” dan seiring dengan menurunnya hasil pertanian dengan sistem tradisional. Revolusi elektronik juga berdampak negatif bagi negara-negara berkembang, yaitu menambah jumlah pengangguran dan memperdalam jurang kaya miskin. Namun ini tidak berarti bahwa kemajuan teknologi itu buruk. Keburukannya tidak terletak pada teknologinya saja, tapi juga cara menggunakannya untuk memproduksi dan bidang apa yang seharusnya menggunakan teknologi canggih serta teknologi apa yang harus dikembangkan atau ditunda.

Kategori kedua dari kekerasan tidak langsung menurut Salmi, yaitu kekerasan karena pembiaran. Jenis ini digambarkan dengan seseorang yang berada dalam keadaan bahaya namun tidak ada orang yang menolongnya. Bentuknya antara lain kemiskinan, isu kelaparan, penderitaan karena sakit serta lingkungan kerja masyarakat miskin.

Kemiskinan dan ketidakadilan sosial di negara-negara kapitalis adalah bentuk paling jelas dari kekerasan karena pembiaran. Kesenjangan pendapatan ekonomi antara negara kaya dan berkembang merupakan aspek pertama dalam kekerasan jenis ini. Implikasi dari tingkat ketidakadilan yang tinggi ini, yang telah diteliti di sebagian besar negara-negara tersebut, adalah ternyata sebagian besar manusia hidup dalam kemiskinan mutlak. Untuk mengetahui asal

usul ketidakadilan di dalam ekonomi kapitalis, kita perlu melihat faktor determinan yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan sangat terkait dengan proses produksi. Salmi menyitir prinsip distribusi pendapatan yang diutarakan oleh Milton Friedman dalam buku *Capitalism and Freedom* bahwa setiap orang seharusnya menerima sesuai dengan apa yang diproduksinya berikut alat-alat produksi yang dimilikinya. Menurut prinsip ini, pendapatan setiap individu ditentukan oleh kuantitas faktor produksi yang dimilikinya dan besarnya keuntungan yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi tersebut. Namun permasalahannya ternyata distribusi kepemilikan modal tidaklah adil. Agar ekonomi kapitalis dapat beroperasi maka harus memiliki pasar buruh di mana tenaga mereka dapat ditukar dengan upah. Jika alat produksi (tanah dan modal) terdistribusi secara adil, tidak akan ada perbedaan antara buruh dan pemilik alat produksi sehingga tidak ada orang yang merasa terpaksa bekerja untuk mendapatkan upah. Sumber ketidakadilan berikutnya, yaitu tidak setaranya keuntungan yang diperoleh dari modal dan buruh. Perbedaan ini disebabkan pemilik alat-alat produksilah yang memutuskan pembayaran untuk setiap faktor produksi.

Kriminalitas dengan kekerasan langsung juga merupakan akibat dari kemiskinan di banyak negara. Salmi menyatakan dalam sebuah studi tentang kriminalitas menyebutkan bahwa masyarakat dengan distribusi kesehatan dan kekuasaan yang tidak adil cenderung menghadapi masalah kriminalitas yang besar dan sebaliknya. Lingkungan kerja masyarakat miskin sering kali juga diwarnai dengan kekerasan karena pembiaran.

Bentuk kekerasan yang **ketiga** menurut Salmi, yaitu kekerasan represif. Kekerasan ini merupakan kekerasan yang dilegalkan atau tidak dikenakan sanksi atas pelanggaran terhadap hak-hak dasar

masyarakat yang umumnya dilakukan oleh negara atau pemerintah. Bentuk kekerasan ini terkait dengan 3 macam hak dasar manusia, yaitu hak sipil, hak politik, dan hak sosial.

Untuk semakin mengkonkretkan bentuk kekerasan ini, Salmi menjabarkannya ke dalam studi kasus yang berbeda-beda di berbagai negara, seperti Inggris, India, Republik Federal Jerman, Swiss, Jepang, Australia, Kanada, Prancis, dan Amerika Serikat. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Australia. Kesejahteraan dan demokrasi di Australia ternodai oleh praktik rasis dan represif terhadap penduduk Aborigin. Suku Aborigin secara historis dicabut hak-hak tradisionalnya dan hak atas tanah leluhurnya. Kehidupan keseharian dan hak-hak politik mereka dibatasi.

Bentuk kekerasan **keempat** akibat paham kapitalisme yaitu kekerasan alienatif. Kekerasan ini merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi. Konsep kekerasan ini memiliki makna objektif dan makna subjektif. Dalam makna objektif, *alienasi* merupakan sebuah fenomena sosial dimana seorang individu tercabut haknya untuk menentukan nasib sendiri, misalnya ditolak hak atau kesempatannya untuk berperan aktif dalam proses pembuatan keputusan tentang karakter dan orientasi kehidupan profesional serta sosial dirinya. Sedangkan dalam makna subjektif, *alienasi* secara esensial memiliki makna psikologis dan mengacu pada situasi dimana individu merasa asing dengan dirinya sendiri, kebudayaannya atau komunitasnya.

Kekerasan alienatif memiliki dampak di berbagai bidang. Di antaranya pada organisasi kerja modern. Di dalam organisasi yang seperti ini, setiap pekerja memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang sempit sehingga keterlibatan dan partisipasi nyata mereka di dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat global menjadi terpinggirkan.

Jenis kekerasan yang diakibatkan oleh ekonomi kapitalis ini tidak hanya

mempengaruhi orang yang bekerja di pabrik-pabrik dan kantor modern, tapi juga orang dan komunitas yang hidup di pinggir-pinggir sistem ekonomi modern. Hal ini terjadi setiap kali perusahaan kapitalis berbenturan dengan sebuah sistem ekonomi tradisional yang sedemikian hingga membatasi dan mencegah kegiatan-kegiatan produksi dimana pola kehidupan kultural dan sosial masyarakat yang bersangkutan tergantung padanya.

Dimensi lain dari kekerasan alienatif yaitu rasisme. Rasisme bukan hanya berupa kebencian untuk mengisolasi beberapa orang pinggiran yang mempunyai ide-ide yang menyimpang, tapi esensinya merupakan sebuah fenomena sosial dan perannya sama dengan ideologi dalam masyarakat kapitalis.

Seksisme dapat juga dianggap sebagai sebuah bentuk rasisme. Dengan dalih adanya perbedaan psikologis dan biologis yang fundamental antara laki-laki dan perempuan, hierarki sosial telah berkembang jauh sehingga menguntungkan kaum laki-laki. Perempuan khususnya ditempatkan sebagai subordinat yang berakibat pada semua aspek kehidupan sehari-hari yang biasanya berorientasi domestik. Bentuk lain dari kekerasan alienatif, yaitu adanya pemujaan terhadap perilaku konsumtif yang terjadi di negara-negara industri maju.

Bagian akhir buku ini disimpulkan oleh Salmi bahwa kekerasan merupakan fenomena multisegi yang berkaitan dengan sebab-sebab khusus dan akibat-akibatnya serta merefleksikan adanya keyakinan penuh bahwa terdapat nilai-nilai hak asasi manusia yang universal.

Bila sedikit membandingkan dengan teori peradaban yang dikemukakan oleh Johan Galtung⁴, kategori kekerasan dibagi menjadi kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Khususnya tentang kekerasan kultural yang tampaknya tidak secara eksplisit dikemukakan oleh

Salmi, Galtung berpendapat bahwa kekerasan kultural terjadi ketika aspek budaya, ranah simbolik kita dapat digunakan untuk menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan langsung atau struktural. Kekerasan kultural merupakan kekerasan langsung yang dilegitimasi dan dengan demikian dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Misalnya asumsi yang dibangun bahwa pembunuhan atas nama negara adalah benar, sedangkan atas nama individu adalah salah, sesungguhnya dapat mengaburkan realita yang terjadi.

Akhir kata, buku setebal 292 halaman ini kaya akan referensi peristiwa sejarah konkret yang pernah terjadi di berbagai negara sebagai bentuk dari berbagai kekerasan beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Struktur buku ini sangat sistematis dan dalam beberapa hal cukup netral dalam menilai bentuk-bentuk kekerasan yang pernah terjadi dalam peradaban manusia. Meskipun subjektivitas yang menggambarkan tuntutan kesetaraan dan keadilan yang proporsional antara negara maju dan negara berkembang bahkan dengan negara Dunia Ketiga, kerap muncul dalam pemikiran Salmi. Kemudian yang menarik, buku ini dapat dijadikan kerangka berpikir untuk melakukan studi tentang kekerasan di segala lapisan masyarakat dalam situasi apa pun.

Daftar Pustaka

- Galtung, Johan. 2003. *Studi Perdamaian*. Jakarta: Pustaka Eureka.
- Primoratz, Igor. *State Terrorism and Counterterrorism*, Working Paper Number 2002/3. Melbourne: Centre for Apply Philosophy and Public Ethics, dalam <http://eprints.unimelb.edu.au/archive/00000137/01/Primorat.pdf>.
- Van Boven, Theo. 2002. *Mereka yang Menjadi Korban*. Jakarta: ELSAM.
- Wikipedia. *Capitalism*. Yang diakses pada 3 Juli 2006

⁴ Johan Galtung, *Studi Perdamaian*, Pustaka Eureka, 2003, hlm. 431.